

SKRIPSI

**EVALUASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI KELURAHAN BENJALA
KECAMATAN BONTO BAHARI KABUPATEN BULUKUMBA**

AHMAD JABAL NUR

E011191036



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ABSTRAK

Ahmad Jabal Nur (E011191036), Evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kelurahan Benjala Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba, +117 Halaman +12 Tabel +3 Gambar +28 Pustaka + dibawah bimbingan Prof. Dr. Moh. Thahir Haning. M.Si dan Dr. Muh. Tang Abdullah. S.Sos., M.A.P.

Penelitian ini di latar belakang oleh masih banyaknya daerah di Kabupaten Bulukumba yang masih kekurangan air bersih dan kondisi sanitasi yang buruk. Salah satu daerah di Kabupaten Bulukumba mengalami kekeringan yang memprihatinkan saat musim kemarau dengan sanitasi yang buruk adalah di Kelurahan Benjala, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba. Untuk itu, dengan hadirnya Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) ini diharapkan dapat menjadi solusi dari masalah kekurangan air bersih dan sanitasi yang buruk pada saat musim kemarau. Namun masih banyak masalah yang timbul setelah program ini terlaksana sehingga peneliti tertarik untuk meneliti program PAMSIMAS di Kelurahan Benjala.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Di Kelurahan Benjala, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Focus penelitiannya adalah evaluasi program formatif, menggunakan teori indikator evaluasi administrasi oleh Howlett dan Ramesh yaitu effort evaluation, performance evaluation, adequacy of performance evaluation, efficiency evaluation dan process evaluation

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program PAMSIMAS di Kelurahan Benjala Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba, jika dilihat dari indikator performance evaluation, adequacy of performance evaluation dan efficiency evaluation sudah dapat dikatakan terlaksana dengan cukup baik karena program dari PAMSIMAS Kelurahan Benjala telah menghasilkan kualitas dan kuantitas air bersih yang baik sehingga telah memberikan manfaat dan kemudahan yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Kelurahan Benjala, namun jika dilihat dari indikator effort evaluation dan process evaluation masih belum terlaksana dengan baik karena terdapat sarana prasarana yang terbengkalai yakni sumur bor dalam pada tahun 2013 dan 2020, Bahan perpipaan yang tidak mencukupi dan mengakibatkan wilayah rencana program penyediaan air bersih PAMSIMAS Kelurahan Benjala belum terealisasi sampai sekarang sehingga target pengguna program penyediaan air bersih sulit untuk tercapai, kemudian terdapat metode pembayaran yang berbeda serta masih minimnya pengembangan program dari PAMSIMAS Kelurahan Benjala.



Kata Kunci : Evaluasi, Evaluasi Program, Masyarakat, PAMSIMAS

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ABSTRACT

Ahmad Jabal Nur (E011191036), Evaluation of Based Water Supply and Sanitation Program in Benjala Village, Bonto Bahari Sub-District, Bulukumba District +117 Page +12 Table +3 Picture +28 References + under the guidance of Prof. Dr. Moh. Thahir Haning. M.Si dan Dr. Muh. Tang Abdullah. S.Sos,. M.A.P.

This research is motivated by the fact that there are still many areas in Bukukumba Regency that still lack clean water and poor sanitation conditions. One of the areas in Bulukumba Regency which is experiencing a worrying drought during the dry season with poor sanitation is Benjala Village, Bonto Bahari District, Bukukumba Regency. For this reason, the presence of the Community-Based Water Supply and Sanitation Program (PAMSIMAS) is expected to be a solution to the problem of lack of clean water and poor sanitation during the dry season. However, there are still many problems that arise after this program is implemented, so researchers are interested in researching the PAMSIMAS program in Benjala Village.

This study aims to evaluate the Community-Based Water Supply and Sanitation Program (PAMSIMAS) in Benjala Village, Bonto Bahari District, Bulukumba Regency using a descriptive qualitative research method. The focus of the research is formative program evaluation, using the theory of administrative evaluation indicators by Howlett and Ramesh namely effort evaluation, performance evaluation, adequacy of performance evaluation, efficiency evaluation and process evaluation.

The results of this research indicate that the implementation of the PAMSIMAS program in Benjala Village, Bonto Bahari Sub-District, Bulukumba District, if seen from the performance evaluation indicators, can be said to have implemented the adequacy of performance evaluation and efficiency evaluation quite well. because the PAMSIMAS program in Benjala Village has produced good water quality and quantity. so that it has provided benefits and convenience that can be felt directly by the people of Benjala village, however, if seen from the effort evaluation indicators and process evaluation it has not been implemented well because there is still neglected infrastructure, namely drilled wells. wells in 2013 and 2020, insufficient piping material has resulted in the planned area for the PAMSIMAS clean water supply program in Benjala Village to date not being realized so that the target users of the clean water supply program are difficult to achieve, and there are differences. in payment methods and the lack of program development from PAMSIMAS in Benjala Village

Keywords: Evaluation, Program Evaluation, Public, PAMSIMAS



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Ahmad Jabal Nur
NIM : E011 19 1036
Program Studi : Ilmu Administasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kelurahan Benjara Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba”** benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip ataupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Makassar, 19 Oktober 2023



Ahmad Jabal Nur

E011191036



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Jabal Nur
NIM : E011 19 1036
Program Studi : Ilmu Administasi Publik
Judul : Evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Di Kelurahan Benjala Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba

Telah diperiksa oleh Pembimbing I, Pembimbing II dan Tim Penguji skripsi dan dinyatakan sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 19 Oktober 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Moh. Thahir Haning, M.Si
NIP 19570507 198403 1 001

Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., M.A.P
NIP 197205072 00212 1 001

Mengetahui:
Ketua Departemen Ilmu Administrasi Publik,



Prof. Dr. Awi, M.Si
NIP 19631015 198903 1 006



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

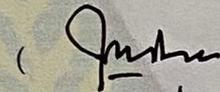
Nama : Ahmad Jabal Nur
NIM : E011 19 1036
Program Studi : Ilmu Administasi Publik
Judul : Evaluasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kelurahan Benjala Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba

Telah diperiksa oleh Pembimbing I, Pembimbing II dan Tim Penguji skripsi dan dinyatakan sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 19 Oktober 2023

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Prof. Dr. Moh. Thahir Haning, M.Si
Sekertaris : Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., MAP
Anggota : 1. Adnan Nasution, S.Sos., M.Si
2. Rizal Pauzi, S.Sos., M.Si

()

()

()

()

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami selalu panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, Tuhan pemilik semesta alam dan sumber segala pengetahuan. Karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak ternilai dan tak dapat dihitung sehingga Alhamdulillah skripsi dengan judul "Evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Di Kelurahan Benjala Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba dapat terselesaikan", tak lupa pula shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kearah yang lebih baik.

Kemudian, skripsi ini sudah saya buat dengan usaha semaksimal mungkin dan mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga bisa memudahkan dalam proses pembuatan skripsi ini. Dengan hal tersebut kami sampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini. Kami juga berharap semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman untuk para pembaca nantinya. Selain itu, kami berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat dalam kehidupan para pembaca.

Adapun harapan penulis adalah agar kiranya pembaca berkenan memberikan saran membangun. Apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan di hati para pembaca baik itu disengaja maupun tidak disengaja, penulis menyampaikan permohonan maaf. Karena sesungguhnya tidak ada manusia yang tak luput dari kesempurnaan.

Ucapan terima kasih tak lupa penulis ucapkan teruntuk kedua orang tua tersayang ayahanda **Rahmat** (Alm) dan ibunda **Hj. Megawati** tercinta atas segala doa dan dukungannya selama ini. terima kasih atas semua yang engkau berikan. Dengan

segala kerendahan hati, disampaikan rasa hormat dan rasa terimakasih yang tulus oleh penulis kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc sebagai Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Phil Sukri, S.IP., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf nya.
3. Prof. Dr. Alwi, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Prof. Dr. H M. Thahir Haning, M.Si dan Dr. Muh Tang Abdullah, S.Sos., M.A.P selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah mendorong, membantu, membimbing serta mengarahkan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Adnan Nasution, S.Sos., M.Si dan Rizal Pauzi, S.Sos., M.Si selaku dosen penguji dalam sidang proposal dan sidang skripsi dan atas segala motivasi, kritik serta saran yang membangun dalam skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Departemen Ilmu Administrasi. Terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh staf dan pegawai Departemen Ilmu Administrasi (Ibu Rosminah, Ibu Ani, Ibu Darma, Pak Lili) dan seluruh staf di lingkup Fakultas. Terima kasih atas segala bantuan kepada penulis selama ini.
8. Kepada Bapak Andi Adil, S.E selaku Lurah Benjara, kepada seluruh staf di Kantor Kelurahan Benjara serta Masyarakat Kelurahan Benjara yang telah banyak membantu penulis dan memberikan informasi selama masa penelitian.

9. Kepada Bapak Salamung selaku ketua Pelaksana PAMSIMAS Kelurahan Benjara dan seluruh tim pengelola PAMSIMAS Kelurahan Benjara atas segala bantuan dan informasi yang telah diberikan selama masa penelitian.
10. Teman teman seperjuangan MIRACLE 2019 terima kasih atas segala bantuannya dalam proses perkuliahan di kampus ini.
11. Kepada Indy Syahira Resky terima kasih telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
12. Kepada teman teman Social Respect Muhammad Khaerul Ikhsan, Saifullah, May Elza Ambari S.E, Nur Azizah, Andi Purnama Intan S.I.Kom dan Sherli Pratiwi S.Hum atas semua bantuannya selama ini.
13. Kepada teman teman KKN Tematik Unhas UMKM Kabupaten Bantaeng posko 2 Jamur Tiram Fatur, Faidah, Uci, Aul, Maria dan Nabila.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu terima kasih telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Makassar, 18 September 2023

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2. Rumusan Masalah.....	8
I.3. Tujuan Penelitian.....	9
I.4. Manfaat Penelitian.....	9
I.5. Penelitian Terdahulu.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
II.1. Evaluasi.....	12
II.1.1. Evaluasi Kebijakan.....	14
II.1.2. Evaluasi Program.....	17
II.2.1. Evaluasi Formatif Sumatif	19
II.3. Tinjauan PAMSIMAS	23
II.3.1 Tujuan PAMSIMAS	24
II.3.2. Sasaran PAMSIMAS.....	25
II.3.3. Strategi PAMSIMAS.....	27
II.3.4. Pendekatan PAMSIMAS	29
II.3.5. Prinsip PAMSIMAS	30
II.3.6. Kondisi Yang Diharapkan.....	32
II.3.7. Sumber Pendanaan	33
II.4. Kerangka berpikir	38

BAB III METODE PENELITIAN.....	39
III.1. Jenis Penelitian	39
III.2. Lokasi Penelitian	42
III.3. Informan Penelitian.....	42
III.4. Fokus Penelitian.....	42
III.5. Jenis Data	44
III.6. Teknik Pengumpulan Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
IV. 1. Kondisi Wilayah Kabupaten Bulukumba	49
IV. 2. Gambaran Umum Kelurahan Benjala.....	50
IV. 3. Evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kelurahan Benjala Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba.	55
IV.3.1. Effort Evaluation	55
IV.3.2. Performance Evaluation	59
IV.3.3. Adequacy of Performance Evaluation/Effectiveness Evaluation	64
IV.3.4. Efficiency Evaluation.....	70
IV.3.5. Process Evaluation.....	78
BAB V PENUTUP.....	85
V.1. Kesimpulan	85
V.2. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Jumlah penduduk dan akses terhadap sarana air minum dan sanitasi berdasarkan Hasil identifikasi masalah dan analisis situasi (IMAS).....	5
Tabel I.2. Jumlah tambahan Pengguna Program Penyediaan Air Minum Pamsimas Kelurahan Benjala.....	6
Tabel I.3. Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel IV.1. Jumlah Penduduk Kelurahan Benjala Berdasarkan Jenis Kelamin.....	52
Tabel IV.2. Penyebaran Penduduk di Kelurahan Benjala Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	52
Tabel IV.3. Penyebaran Penduduk (KK) di Kelurahan Benjala Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan.....	53
Tabel IV.4. Penyebaran Penduduk di Kelurahan Benjala Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	54
Tabel IV.5. Penyediaan sarana dan prasarana program PAMSIMAS Kelurahan Banjala.....	55
Tabel IV.6. Jumlah akses Masyarakat terhadap sarana air minum di Kelurahan Benjala sebelum dan sesudah adanya program Pamsimas.....	66
Tabel IV.7. Biaya pengeluaran masyarakat perbulan berdasarkan sebelum dan sesudah adanya program PAMSIMAS di Kelurahan Benjala.....	75
Tabel IV.8. Partisipasi dalam pelaksanaan PAMSIMAS Kelurahan Benjala.....	82
Tabel IV.9. Proses pelaksanaan PAMSIMAS Kelurahan Benjala.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Grafik rata-rata pemakaian air masyarakat sebelum dan sesudah adanya program PAMSIMAS Kelurahan Benjara.....	61
Gambar 4.2. Grafik rata-rata pemakaian air masyarakat sebelum dan sesudah adanya program PAMSIMAS Kelurahan Benjara.....	74
Gambar 4.3. Grafik rata-rata pengeluaran biaya masyarakat perbulan untuk kebutuhan air bersih sebelum dan sesudah adanya program PAMSIMAS.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) merupakan salah satu Program PNPM Pendukung dalam rangka menciptakan masyarakat hidup bersih dan sehat melalui penyediaan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Program ini merupakan salah satu program dan kegiatan yang nyata pemerintah (pusat dan daerah) dengan dukungan Bank Dunia, untuk meningkatkan persediaan air minum, sanitasi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) telah menjadi salah satu program andalan nasional (Pemerintah dan Pemerintah Daerah) untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat. Program PAMSIMAS I yang dimulai pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 dan PAMSIMAS II dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat di sekitar 12.000 desa yang tersebar di 233 kabupaten/kota. Untuk terus meningkatkan akses penduduk perdesaan dan pinggiran kota terhadap fasilitas air minum dan sanitasi dalam rangka pencapaian target Akses Universal Air Minum dan Sanitasi dan target SDGs, Program PAMSIMAS dilanjutkan pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 khusus untuk desa-desa di Kabupaten, Pada tahun 2022 PAMSIMAS dilanjutkan pelaksanaannya

sebagai kegiatan untuk mendukung capaian air minum layak dan aman untuk seluruh masyarakat Indonesia pada tahun 2024 sesuai dengan RPJMN 2020-2024.

Program PAMSIMAS ini merupakan salah satu tujuan dari Millennium Development Goals (MDGs) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat. Salah satunya dalam pembangunan air minum dan sanitasi (water supply and sanitation). Ketersediaan akses air minum dan sanitasi yang baik dan benar merupakan salah satu bagian dari syarat kehidupan masyarakat Indonesia yang sehat dan sejahtera.

Pelaksanaan Program PAMSIMAS Tahun 2008-2021 telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pemberdayaan masyarakat Pendekatan pemberdayaan masyarakat telah mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah dan Pemerintah dalam menyediakan dan meningkatkan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi.

Pada tahun 2022, Indonesia masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, pelaksanaan Program PAMSIMAS tahun 2021 perlu dilakukan upaya yang lebih intensif dan menyeluruh dalam pencegahan dan penanganan dampak penyebarannya termasuk dalam pelaksanaan Program PAMSIMAS. Program PAMSIMAS tidak dapat ditunda pelaksanaannya karena dapat memberikan kontribusi terhadap pencegahan penyebaran COVID-19 yaitu berupa pembangunan sarana air minum, sarana sanitasi di sekolah, sarana cuci tangan di tempat umum serta

membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat terutama perilaku cuci tangan pakai sabun

Pelaksanaan PAMSIMAS Tahun 2022, merupakan kelanjutan dari PAMSIMAS tahun sebelumnya dan merupakan instrumen pelaksanaan dua agenda nasional yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perdesaan/kelurahan yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target akses air minum dan sanitasi pada tahun 2024 di sektor air minum dan sanitasi, melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 tahun 2014 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi, bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat serta penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai universal access pada akhir tahun 2019.

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang merupakan sebuah program yang perlu pengukuran. Jadi, selama program dilaksanakan apakah berjalan dengan efektif atau tidak. Dalam program tersebut sudah menunjukkan seberapa jauh tingkat pencapaian tujuannya atau suatu target dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, baik itu dari segi kualitas, kuantitas,

maupun waktu. Apabila suatu rencana tidak tercapai, maka program tersebut dapat dikatakan tidak efektif kegiatannya sehingga tidak bersifat efektivitas.

Penelitian ini di latar belakang oleh masih banyaknya daerah di Kabupaten Bukukumba yang masih kekurangan air bersih dan kondisi sanitasi yang buruk. Salah satu daerah di Kabupaten Bulukumba mengalami kekeringan yang memprihatinkan saat musim kemarau dengan sanitasi yang buruk adalah di Kelurahan Benjala, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bukukumba. Untuk itu, dengan hadirnya Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) ini diharapkan dapat menjadi solusi dari masalah kekurangan air bersih dan sanitasi yang buruk pada saat musim kemarau. Namun masih banyak masalah yang timbul setelah program ini terlaksana sehingga peneliti tertarik untuk meneliti program PAMSIMAS di Kelurahan Benjala.

Kelurahan benjala termasuk di dalam daftar sasaran program PAMSIMAS II 2013 dalam Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Tentang Penetapan Desa / Kelurahan Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Bersifat Masyarakat Tahun Anggaran 2013. Berdasarkan tujuan Program ini yaitu untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target MDGs (sektor air minum dan sanitasi) melalui pengarusutamaan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.

Tabel I. 1. Jumlah penduduk dan akses terhadap sarana air minum dan sanitasi berdasarkan Hasil identifikasi masalah dan analisis situasi (IMAS) sebagai berikut:

No	Lingkungan	Jumlah		Akses (KK)	
		Penduduk (orang)	Rumah Tangga (KK)	Sarana Air Minum (KK)	Sarana Sanitasi (KK)
1	Parammassaile	1333	365	177	157
2	Pattompongan	945	281	138	58
3	Limbua	954	242	218	108
4	Batumesu	1660	335	335	253
Jumlah		4892	1223	868	576

Sumber: RKM Kelurahan Benjala PAMSIMAS 2013

Kelurahan Kelurahan Benjala termasuk kelurahan yang masih sangat besar jumlah penduduk yang mempunyai akses air bersih yang minim. Sehingga memerlukan kegiatan untuk peningkatan air bersih. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk yang mengakses air bersih tahun 2013 sebanyak 4.140 jiwa dengan jumlah 1.035 KK dalam presentase 80.5% sedangkan jumlah yang belum dapat mengakses air bersih yang layak 752 Jiwa dengan 188 KK dalam presentase 19.5% dengan rincian 105 KK dari Lingkungan Parammassaile dan 84 KK dari Lingkungan Pattompongan, sehingga dalam kategori yang ada di program PAMSIMAS II memerlukan kegiatan perluasan, cangkupan air minum dan sanitasi yang masih sangat minim meskipun untuk melihat jumlah aksesnya tinggi terkadang di musim kemarau masyarakat harus membeli air disebabkan sumber air menjadi kering.

Tabel I. 2. Jumlah Tambahan Pengguna Program Penyediaan Air Minum PAMSIMAS Kelurahan Benjela sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah Tambahan Pengguna (KK)	Persentase (%)
1	2016	26	30,6
2	2017	11	13
3	2018	1	1,1
4	2019	2	2,3
5	2020	0	0
6	2021	0	0
7	2022	0	0
8	2023	45	53
Jumlah		85	100

Sumber: Buku Penerimaan Iuran Wajib PAMSIMAS Kelurahan Benjela

Berdasarkan tabel diatas, penambahan jumlah penerima manfaat program penyediaan air bersih dari PAMSIMAS Kelurahan Benjela paling tinggi terjadi pada Tahun 2023 sebesar 45 KK atau sama dengan 53% dari keseluruhan jumlah penerima manfaat dari Program PAMSIMAS ini. hal tersebut terjadi karena pada Tahun 2023 terdapat perbaikan dan pengembangan yang dilakukan oleh pengelola PAMSIMAS setelah program dari PAMSIMAS ini macet sejak Tahun 2020, pengembangan yang dilakukan adalah dengan menambah saluran perpipaan ke beberapa Lorong perumahan yang ada di Lingkungan Parammassaile sehingga lebih banyak lagi

masyarakat yang bisa ikut dalam program penyediaan air bersih oleh PAMSIMAS. Akan tetapi setelah berjalan selama 8 Tahun, Program penyediaan air bersih bagi masyarakat di Kelurahan Benjara khususnya di Lingkungan Parammassaile masih belum bisa mencapai target dari rencana kerja PAMSIMAS Kelurahan Benjara yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk memastikan program ini berjalan dengan optimal maka sudah selayaknya seluruh masyarakat Lingkungan Parammassaile Kelurahan Benjara yang kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah sebagai sasaran utama dari program ini dapat merasakan manfaat dari program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat ini.

Namun pada kenyataannya pada pelaksanaan program penyediaan air bersih tidak berjalan dengan begitu baik, program air bersih dari PAMSIMAS baru berjalan pada Tahun 2016 yang telah dibentuk pada Tahun 2013 dan air tidak mengalir sejak awal Tahun 2020 sampai dengan akhir Tahun 2022, baru pada awal Tahun 2023 air dari program PAMSIMAS Kelurahan Benjara mengalir kembali sejak awal tahun 2020 program penyediaan air bersih dari PAMSIMAS Kelurahan Benjara sudah mulai tidak mengalir ke rumah-rumah masyarakat penerima manfaat PAMSIMAS. Padahal kepengurusan dan pelaksanaan PAMSIMAS Kelurahan Benjara masih berjalan sampai sekarang,

Program sanitasi dari PAMSIMAS kelurahan Benjara tidak dilaksanakan secara berkelanjutan, dari awal diprogramkannya PAMSIMAS di Kelurahan Benjara sampai sekarang sosialisasi mengenai sanitasi hanya dilaksanakan 4 kali di tahun 2013 dan tidak dilakukan pada tahun-tahun berikutnya.

Apabila ditinjau mengenai pemahaman program, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui program program dari PAMSIMAS, berdasarkan observasi dan wawancara dengan masyarakat, sebagian masyarakat mengetahui program dari PAMSIMAS ini hanya program penyediaan air bersih. Hal itu dilihat dari kurangnya sosialisasi secara menyeluruh terkait dengan PAMSIMAS dan apa saja program dari PAMSIMAS.

Adapun model evaluasi yang akan digunakan yakni Model Evaluasi Formatif Sumatif namun karena program ini masih berjalan maka dari itu peneliti akan focus pada Evaluasi Formatif saja dengan menggunakan indikator evaluasi oleh Howlett dan Ramesh yakni evaluasi usaha, evaluasi kinerja, evaluasi kecukupan kerja, evaluasi efisiensi dan evaluasi proses.

Berdasarkan pemaparan diatas dengan berbagai masalah-masalah yang masih terjadi setelah program PAMSIMAS ini terlaksana maka peneliti mencoba untuk membahas dan meneliti mengenai pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) khususnya di Lingkungan Parammassaile Kelurahan Benjala, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba. Untuk itu peneliti mengangkat judul penelitian yaitu EVALUASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI KELURAHAN BENJALA, KECAMATAN BONTO BAHARI, KABUPATEN BULUKUMBA.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana Evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis

Masyarakat (PAMSIMAS) Di Kelurahan Benjala, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba.

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Di Kelurahan Benjala, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba.

I.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan penulis dan pembaca tentang Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) serta dapat menjadi bahan kajian ilmiah terkait evaluasi program-program dari pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran dan sebagai masukan bagi semua pihak khususnya bagi pemerintah, tim pengelola PAMSIMAS dan masyarakat kelurahan Benjala agar lebih maksimal lagi dalam pelaksanaan dan pengembangan program PAMSIMAS di Kelurahan Benjala.

I.5. Penelitian Terdahulu

Tabel I. 3. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Teori dan Variabel	Hasil Penelitian
Epi Indah Serniati Evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Di Kecamatan Tomori Kabupaten Luwu Timur	Menggunakan teori oleh William N. Dunn (2012): 1. Efektivitas 2. Efisien 3. Kecukupan 4. Perataan 5. Responsivitas 6. Ketepatan	Dalam pelaksanaan program air minum dan sanitasi yang dilakukan di kecamatan tomori kabupaten luwu timur sudah terlaksana dengan cukup baik. Tingkat efektifitas sudah sangat efektif karena sudah banyak masyarakat yang mulai menggunakan air Pam.
Suci Maning Ratu Efektivitas Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba	Menggunakan teori oleh Lubis Hari dan Husein Martani: 1. Pendekatan Sumber (Input) 2. Pendekatan Proses (Process) 3. Pendekatan Sasaran (Output)	berdasarkan pendekatan melalui teori yang digunakan, pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Karama sudah dapat dikatakan cukup efektif, dalam pembentukan pengurus PAMSIMAS masyarakat mau ikut serta sebagai pengurus Program PAMSIMAS serta dalam memperoleh tenaga kerja pada saat pembangunan sudah baik dan dapat memperoleh sumber dana hingga berjalan dengan lancar, akan tetapi partisipasi masyarakat untuk ikut serta pada saat program mulai berjalan masih sangat kurang sehingga pengguna belum sampai jumlah rumah tangga yang ditargetkan. Dilihat dari pendekatan proses dan sasaran masih belum efektif karena

		prosesnya belum berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya serta program PAMSIMAS di Dusun Lempongge juga masih belum tepat sasaran.
Rahmadi Sagita Evaluasi Program Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti	Menggunakan teori oleh William N. Dunn (2013): 1. Efektivitas 2. Efisien 3. Kecukupan 4. Perataan 5. Responsivitas Ketepatan	Dari keseluruhan aspek yang telah dilakukan penelitian terlihat bahwa pembangunan program PAMSIMAS secara fisik terlaksana dengan baik tetapi penelitian menunjukkan bahwa berbagai capaian sebelum dan sesudah program tidak mengalami perubahan kearah yang lebih baik pada penyediaan air bersih dan sanitasi kepada masyarakat. PAMSIMAS tidak digunakan oleh masyarakat dikarenakan desa berada di pinggiran sungai. Anggaran program PAMSIMAS berjalan dengan lancar tetapi hasil yang diberikan pada tahap berkelanjutan PAMSIMAS berada dalam kondisi tidak berfungsi (merah)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Evaluasi

Secara prinsip, pelaksanaan kebijakan publik memiliki tujuan khusus, yang bertujuan mencapai sasaran-sasaran yang sebelumnya telah diidentifikasi berdasarkan permasalahan yang ada. Evaluasi diperlukan karena tidak semua program kebijakan publik selalu berhasil mencapai hasil yang diharapkan. Kebijakan publik sering kali tidak mampu mencapai maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, tujuan evaluasi kebijakan adalah untuk menganalisis penyebab kegagalan kebijakan tersebut atau menilai apakah kebijakan publik telah mencapai tujuan dan dampak yang diinginkan. Calhoun 2021 dalam (Damalie, 2022) mencatat bahwa evaluasi adalah proses yang memeriksa secara kritis organisasi dan kinerja suatu program yang melibatkan pengumpulan dan analisis informasi tentang kegiatan, karakteristik, dan hasil untuk membuat penilaian untuk meningkatkan efektivitasnya dan menginformasikan keputusan di masa depan. Maka, evaluasi kebijakan mencakup identifikasi permasalahan dalam kebijakan, program-program yang diajukan untuk mengatasi masalah tersebut, pelaksanaan, dan dampak dari kebijakan tersebut.

Menurut Menezes 2022 dalam (Damalie, 2022) evaluasi adalah tentang menentukan seberapa sukses mediasi dan identifikasi area untuk perbaikan. Evaluasi memainkan peran penting dalam proses pembuatan kebijakan dan perencanaan, terutama di sektor publik untuk memastikan bahwa sumber daya tidak terbuang sia-sia dan tujuan program dan acara tercapai. (Pramono, 2020) Evaluasi merupakan

suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Evaluasi hanya dapat dilakukan setelah kebijakan berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama, sekitar 4-5 tahun setelah implementasi, karena jika dilakukan terlalu cepat, dampak dan hasil dari kebijakan belum terlihat dengan jelas. Semakin penting suatu kebijakan, semakin diperlukan waktu yang lebih panjang untuk mengevaluasinya. Evaluasi merupakan pendekatan sistematis untuk memeriksa suatu program, praktik, intervensi, atau inisiatif guna memahami sejauh mana pencapaian tujuannya. Dengan kata lain, evaluasi membantu mengidentifikasi keberhasilan dan area yang perlu ditingkatkan dalam suatu program atau inisiatif. Evaluasi menyediakan metode sistematis untuk mempelajari suatu program, praktik, intervensi, atau inisiatif untuk memahami seberapa baik program tersebut mencapai tujuannya. dapat disimpulkan bahwa evaluasi membantu untuk menentukan apa yang bekerja dengan baik dan apa yang dapat ditingkatkan dalam suatu program atau inisiatif.

(Fitriyah, 2019) Evaluasi merupakan salah satu tahap penting dalam proses manajemen, evaluasi yang dilakukan akan berguna dalam memberikan feed back (umpan balik) atas pelaksanaan suatu kegiatan atau program yang telah direncanakan agar pelaksanaan program atau kegiatan tersebut tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan sebelumnya, karena itu pelaksanaan evaluasi terhadap program atau kegiatan perlu dilakukan secara rutin, berkesinambungan, dan tegas. Secara umum pengertian evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara

keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.

Dari berbagai definisi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses yang dilakukan untuk mengamati pelaksanaan suatu program atau kebijakan, kemudian menilai sejauh mana program tersebut telah dijalankan dengan efektif atau belum.

II.1.1. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi umumnya digunakan untuk menilai tingkat efektivitas kebijakan publik, dengan tujuan mempertanggungjawabkannya kepada konstituennya. Hal ini mencakup penilaian terhadap pencapaian tujuan serta perbandingan antara harapan dengan realitas yang tercapai. Seperti yang didefinisikan oleh (Dewi, 2022) evaluasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan penilaian atau evaluasi suatu kebijakan yang meliputi substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dapat dipandang sebagai kegiatan fungsional. Artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi dilakukan di seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan dapat mencakup fase perumusan masalah kebijakan, program yang diusulkan untuk memecahkan masalah kebijakan, implementasi, dan fase dampak kebijakan.

(Akbar & Mohi, 2018) Evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka melihat implementasi kemudian melakukan penilaian terhadap jalannya suatu kebijakan apakah kebijakan sudah terealisasi dengan baik atau belum, Adapun tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak.

Secara umum, menurut (Howlett & Ramesh, 2003) evaluasi kebijakan dapat diklasifikasikan kedalam tiga kategori besar yaitu evaluasi administrasi, evaluasi yudisial dan evaluasi politik. Tiga kategori ini memiliki perbedaan dari cara pelaksanaannya, aktor yang terlibat dan efeknya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan evaluasi administrasi. Evaluasi administrasi adalah fokus dari banyak studi akademik yang dipublikasikan tentang evaluasi kebijakan. Hal ini biasanya dilakukan di dalam pemerintah, kadang-kadang oleh lembaga spesialis yang tugas satu-satunya adalah mengevaluasi kebijakan, tetapi lebih sering dilakukan oleh pengawas keuangan, hukum, dan politik yang melekat pada departemen pemerintah yang ada, lembaga eksekutif khusus, legislatif, dan yudikatif. Konsultan swasta juga dapat disewa oleh berbagai cabang dan lembaga pemerintah untuk melakukan evaluasi dengan biaya tertentu.

Evaluasi kebijakan menurut Howlett dan Ramesh ada beberapa bentuk jenis evaluasi untuk menilai suatu kebijakan yaitu: evaluasi upaya, evaluasi kinerja, kecukupan evaluasi kinerja, evaluasi efisiensi dan evaluasi proses.

1. Evaluasi upaya mencoba untuk mengukur jumlah input program, yaitu jumlah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan mereka. Masukan tersebut dapat berupa personel, ruang kantor, komunikasi, transportasi, dan seterusnya-semuanya dihitung dalam bentuk biaya moneter yang terlibat. Tujuan evaluasi adalah untuk menetapkan data dasar yang dapat digunakan untuk evaluasi lebih lanjut atas efisiensi atau kualitas pemberian layanan.
2. Evaluasi kinerja memeriksa keluaran program daripada masukan. Contoh keluaran mungkin berupa tempat tidur rumah sakit atau tempat di sekolah, jumlah pasien yang dirawat atau anak-anak yang dididik. Tujuan utama

evaluasi kinerja hanyalah untuk menentukan apa yang dihasilkan oleh kebijakan, seringkali terlepas dari tujuan yang dinyatakan. Jenis evaluasi ini menghasilkan data yang digunakan sebagai masukan untuk evaluasi yang lebih komprehensif dan intensif.

3. Kecukupan evaluasi kinerja (juga dikenal sebagai evaluasi efektivitas) melibatkan lebih banyak kompleksitas daripada sekadar menjumlahkan input atau output program; Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah program tersebut melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Dalam jenis evaluasi ini, kinerja suatu program dibandingkan dengan tujuan yang dimaksudkan untuk menentukan apakah program tersebut mencapai tujuannya dan/atau apakah tujuan perlu disesuaikan dengan pencapaian program. Atas dasar temuan-temuan tersebut dapat dibuat rekomendasi untuk mengubah atau mengubah program atau kebijakan. Sedangkan jenis evaluasi ini paling bermanfaat untuk pembuat kebijakan, hal itu juga yang paling sulit dilakukan. Kebutuhan informasi sangat besar dan tingkat kecanggihan yang diperlukan untuk melaksanakan proses lebih tinggi daripada yang umumnya tersedia di pemerintahan.
4. Evaluasi efisiensi mencoba untuk menilai biaya program dan menilai apakah jumlah dan kualitas keluaran yang sama dapat dicapai dengan lebih efisien, yaitu dengan biaya yang lebih rendah. Evaluasi input dan output adalah blok bangunan dari bentuk evaluasi ini, yang sangat penting dalam iklim pengekangan anggaran. Kesulitan-kesulitan yang terlibat dalam evaluasi efektivitas yang lebih komprehensif berarti bahwa para pembuat kebijakan

seringkali harus berpuas diri dengan evaluasi efisiensi sebagai 'alternatif terbaik kedua'.

5. Terakhir, evaluasi proses memeriksa metode organisasi, termasuk aturan dan prosedur operasi, yang digunakan untuk menyampaikan program. Tujuannya biasanya untuk melihat apakah suatu proses dapat disederhanakan dan dibuat lebih efisien. Untuk tujuan ini, implementasi kebijakan biasanya dipecah menjadi tugas-tugas terpisah, seperti perencanaan strategis, manajemen keuangan, dan hubungan klien, dan kemudian satu atau lebih tugas ini dievaluasi untuk efisiensi, efektivitas, dan/atau akuntabilitas.

II.1.2. Evaluasi Program

Terlihat bahwa dalam evaluasi, salah satu fokus utamanya adalah program. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengevaluasi kesuksesan kebijakan atau program tersebut. (Akbar & Mohi, 2018) Evaluasi Program adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya suatu program dari pemerintah, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif atau pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

(Ambiyar & D, 2019) Evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya suatu program yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil suatu keputusan terkait dengan program yang sedang berjalan. Evaluasi program digunakan untuk mengumpulkan data mengenai pelaksanaan suatu program dan sejauh mana program tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah

untuk membantu pengambil keputusan dalam menentukan Tindakan selanjutnya berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan.

Menurut Pemerintah Federal Amerika Serikat yang di kutip oleh Mu'man Nuryana dalam Karya Tulisnya yaitu "Program Evaluation" terdapat pengertian evaluasi program yaitu Artinya sebuah studi sistematis yang dilakukan untuk menguji bagaimana sebuah program berkerja dengan baik yang secara tipikal focus pada pencapaian tujuan program.

(Fikri, Hastuti, & Wahyuningsih, 2019) Evaluasi program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan. Evaluasi program dilakukan untuk mengetahui apakah program telah berjalan sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan, atau bermakna bahwa apakah program yang dicanangkan telah terealisasikan atau belum. Selain itu dapat dikemukakan pula bahwa evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Evaluasi program bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan atau keputusan yang didasarkan pada hasil evaluasi.

Evaluasi program menggunakan metode khusus untuk memastikan data yang dihasilkan dapat diandalkan dan dipercayai. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang diambil berdasarkan hasil evaluasi menjadi keputusan yang tepat, akurat, dan bermanfaat bagi program tersebut.

II.2. Model Evaluasi Program

Dalam evaluasi program, terdapat beragam model yang dapat digunakan untuk mengevaluasi program tersebut. Meskipun model-model ini beragam, tujuannya sama, yaitu mengumpulkan data atau informasi terkait objek yang dievaluasi. Hal ini bertujuan untuk menyediakan informasi bagi para pengambil keputusan dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya terkait program tersebut.

Menurut Kaufman dan Thomas dalam (Arikunto & Jabar, 2018), membedakan model evaluasi menjadi delapan, yaitu:

- a. Goal Oriented Evaluation Model, dikembangkan oleh Tyler.
- b. Goal Free Evaluation Model, dikembangkan oleh Scriven.
- c. Formatif Summatif Evaluation Model, dikembangkan oleh Michael Scriven.
- d. Countenance Evaluation Model, dikembangkan oleh Stake.
- e. Responsive Evaluation Model, dikembangkan oleh Stake.
- f. CIPP Evaluation Model, dikembangkan oleh Stufflebeam.
- g. Discrepancy Model, dikembangkan oleh Provus.

II.2.1. Evaluasi Formatif Sumatif

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model evaluasi formatif-sumatif, evaluasi formatif-sumatif digunakan untuk menilai sebuah program. Michael Scriven mengembangkan formatif-sumatif. Model ini menunjuk adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih berjalan (disebut evaluasi formatif) dan ketika program sudah selesai atau berakhir (disebut evaluasi sumatif).

Model formatif-sumatif ini ketika melaksanakan evaluasi, evaluator tidak dapat melepaskan diri dari tujuan. Tujuan evaluasi formatif memang berbeda dengan tujuan evaluasi sumatif. Dengan model yang dikemukakan oleh Michael Scriven ini menunjuk tentang "apa, kapan, dan tujuan" evaluasi tersebut dilaksanakan.

Para evaluator, yang mempunyai tugas evaluasi, tentu sudah mengenal dengan baik apa yang dimaksud dengan evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi tersebut dilaksanakan untuk mengetahui sampai seberapa tinggi tingkat keberhasilan atau ketercapaian tujuan untuk masing-masing pokok bahasan.

Evaluasi formatif, pada prinsipnya, merupakan proses evaluasi yang berlangsung ketika program masih berjalan atau mendekati awal pelaksanaan. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana program yang telah direncanakan berjalan dan mengidentifikasi hambatan yang mungkin muncul. Dengan mengetahui hambatan dan faktor-faktor yang menghambat kelancaran program, para pengambil keputusan dapat melakukan perbaikan yang mendukung pencapaian tujuan program secara lebih efektif.

Sementara itu, evaluasi sumatif dilakukan setelah program selesai. Tujuannya adalah untuk mengukur pencapaian keseluruhan program. Evaluasi sumatif juga berfungsi sebagai alat untuk menilai posisi individu dalam kelompoknya. Karena evaluasi formatif dan sumatif memiliki objek, sasaran, dan waktu pelaksanaan yang berbeda, maka ruang lingkup evaluasi keduanya juga berbeda. Lebih banyak detail akan dibahas dalam bagian selanjutnya.

Sepanjang pelaksanaan kebijakan, program atau proyek dapat dilakukan sejumlah evaluasi formatif sesuai dengan kebutuhan atau kontrak kerja evaluasi.

- a. Untuk mengukur hasil pelaksanaan program secara periodik. Apakah pelaksanaan program mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau tidak? Evaluasi mengukur apakah target tersebut telah dicapai atau tidak. Jika target tersebut tidak dicapai, akan memengaruhi termin kerja berikutnya. Pengertian target disini termasuk perubahan keterampilan dan perilaku penerima layanan jasa. Apakah target tersebut telah dicapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan atau tidak. Mungkin target waktu dapat dicapai sesuai dengan rencana, akan tetapi dapat juga target waktu tidak tercapai. Misalnya, seharusnya bulan juli, tetapi baru dapat tercapai bulan Agustus. Jika target waktu gagal, maka akan menghambat pelaksanaan pekerja termin berikutnya.
- b. Untuk mengukur apakah klien/partisipan bergerak ke arah tujuan yang direncanakan. Program atau proyek Memberikan layanan kepada klien atau pemangku kepentingan. Layanan tersebut perlu diukur kuantitas dan kualitasnya pada waktu tertentu secara periodik. Jika kualitas dan kuantitasnya tidak memenuhi target, perlu diketahui hambatan apa yang dihadapi untuk mencapai target dan koreksi apa yang harus dilakukan.
- c. Untuk mengukur apakah sumber-sumber telah dipergunakan sesuai dengan rencana. Dalam melaksanakan program dipergunakan sumber-sumber aktivitas seperti anggaran, tenaga, dan peralatan. Setiap termin pekerjaan telah disediakan sumber-sumber dalam jumlah tertentu. Manajemen program tidak boleh melampaui penggunaan sumber yang telah disediakan. Jika melampaui jumlah yang ditetapkan, akan memengaruhi sumber-sumber termin pekerjaan berikutnya.

- d. Untuk menentukan koreksi apa yang harus dilakukan jika terjadi penyimpangan. Penyimpangan ada beberapa bentuk. Pertama target tujuan, waktu, dan biaya tidak tercapai. Jika ini yang terjadi maka terjadi penyimpangan yang negatif. Evaluasi formatif harus menentukan berapa besar penyimpangan terjadi.
- e. Untuk menentukan koreksi apa yang harus dilakukan jika terjadi penyimpangan. Penyimpangan ada beberapa bentuk:
1. Penyimpangan positif. Penyimpangan positif terjadi jika target terlampaui, artinya kegiatan program dilaksanakan lebih cepat dari yang direncanakan. Target tujuan lebih besar dari yang direncanakan, akan tetapi kualitasnya memenuhi standar dan target sumber-sumber lebih kecil daripada yang ditentukan. Ini bentuk penyimpangan yang diharapkan.
 2. Penyimpangan negatif. Jika terjadi penyimpangan negatif harus dilakukan koreksi misalnya dengan mempercepat kegiatan termin berikutnya. Penyimpangan negatif merupakan penyimpangan yang tidak diharapkan dan harus dihindari. Jika terjadi penyimpangan sumber harus dilakukan penghematan pada kegiatan termin berikutnya. Disamping itu, harus dilakukan audit kegiatan dan penggunaan anggaran.
- f. Memberikan balikan. Evaluasi formatif merupakan bagian integral dari proses pengembangan pelaksanaan program. Evaluasi ini memberikan balikan secara terus-menerus untuk memperbaiki perencanaan, standar prosedur operasi, penggunaan sumber-sumber dan perkembangan pelaksanaan program.

II.3. Tinjauan PAMSIMAS

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) merupakan salah satu Program PNPM Pendukung dalam rangka menciptakan masyarakat hidup bersih dan sehat melalui penyediaan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Pendekatan Berbasis Masyarakat menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam seluruh tahapan mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap pengoperasian dan pemeliharaan.

Kegiatan Program PAMSIMAS mencakup kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan lokal; peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat; penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum; serta pengembangan kapasitas pelaku PAMSIMAS melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk terus melanjutkan capaian target menuju 100% akses air minum dan sanitasi, dimana sampai akhir tahun 2021 sudah mencapai 90,8% untuk akses air minum layak dan 80,29% untuk akses sanitasi layak (Susenas 2021, dalam Pedoman umum PAMSIMAS edisi 2022). Pada RPJMN 2020-2024 juga telah ditargetkan untuk Akses Air Minum Layak dan Akses Sanitasi Layak (kota dan desa) adalah 100%. Disamping itu, Pemerintah saat ini juga dihadapkan pada target pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030 yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) telah menjadi salah satu program andalan nasional (Pemerintah dan Pemerintah Daerah)

untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat.

Program PAMSIMAS yang dimulai pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 dan PAMSIMAS II dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat di sekitar 12.000 desa yang tersebar di 233 kabupaten/kota. Untuk terus meningkatkan akses penduduk perdesaan dan pinggiran kota terhadap fasilitas air minum dan sanitasi dalam rangka pencapaian target Akses Universal Air Minum dan Sanitasi dan target SDGS, Program PAMSIMAS dilanjutkan pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 khusus untuk desa-desa di Kabupaten. Pada tahun 2022 PAMSIMAS dilanjutkan pelaksanaannya sebagai kegiatan untuk mendukung capaian air minum layak dan aman untuk seluruh masyarakat Indonesia pada tahun 2024 sesuai dengan RPJMN 2020-2024 (Pedoman Umum PAMSIMAS edisi 2022).

II.3.1 Tujuan PAMSIMAS

Program PAMSIMAS bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target MDGs (sektor air minum dan sanitasi) melalui pengarusutamaan pendekatan pembangunan berbasis Masyarakat (Pedoman Umum PAMSIMAS edisi 2022).

II.3.2. Sasaran PAMSIMAS

1. Sasaran program

Tujuan program PAMSIMAS tersebut diatas akan tercapai bila sasaran program tersebut dibawah ini, sebagaimana diuraikan dalam indikator kinerja kunci (Key Performance Indicator) PAMSIMAS tercapai:

- 1) Terdapat tambahan 5,6 juta penduduk yang dapat mengakses sarana air minum aman² dan berkelanjutan.
- 2) Terdapat tambahan 4 juta penduduk yang dapat mengakses sarana sanitasi yang layak dan berkelanjutan.
- 3) Minimal 50% masyarakat dusun (lokasi Program) menerapkan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
- 4) Minimal 60% masyarakat mengadopsi program Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS).
- 5) Pemerintah kabupaten/kotamemiliki dokumen perencanaan daerah bidang air minum dan sanitasi untuk mendukung adopsi dan pengarusutamaan Pendekatan PAMSIMAS dan pencapaian target pembangunan air minum dan sanitasi daerah
- 6) Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dari APBD untuk pemeliharaan sarana air minum dan sanitasi yang telah dibangun serta perluasan program air minum dan sanitasi untuk mencapai MDGs.

2. Sasaran lokasi

Penetapan kabupaten/kota dan desa/kelurahan sasaran dilakukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan minat Pemerintah Kabupaten/kota dan usulan desa/kelurahan sasaran Adapun kriteria dan persyaratan Kabupaten/kota Sasaran PAMSIMAS adalah

1. Memiliki cakupan pelayanan air minum dan sanitasi layak yang belum mencapai 100%.
2. Kesanggupan dari Kabupaten/Kota untuk menyediakan dana APBD Kabupaten/Kota untuk membiayai Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) dana APBD untuk sharing desa/kelurahan sasaran (5 Desa BPM dana APBN : 1 Desa BPM dana APBD).
3. Tidak mempunyai hutang Desa BLM APBD tahun sebelumnya (kabupaten/kota yang belum merealisasikan sharing BLM PAMSIMAS tidak akan diberikan kegiatan lanjutan PAMSIMAS).

Adapun kriteria dan persyaratan secara umum desa sasaran PAMSIMAS meliputi:

1. Cakupan akses air minum layak belum 100%.
 2. Tidak termasuk daerah layanan air minum PDAM.
 3. Memiliki sumber air baku atau SPAM eksisting yang dapat dikembangkan.
 4. Adanya kesanggupan masyarakat untuk.
- Kontribusi minimal 10% dari biaya RKM dalam bentuk in-cash (uang tunai) dan atau in-kind (tenaga kerja/material local).

- Mengoperasikan dan memelihara sarana terbangunMenyediakan lahan untuk lokasi pembangunan sarana.

5. Adanya kesanggupan Pemerintah Desa/Kelurahan untuk menyediakan dana untuk pengembangan dan keberlanjutan SPAM terbangun.

6. (Khusus Desa Pasca) Desa telah merealisasikan alokasi APBDes yang menjadi kewajiban sharing pendanaan pembiayaan RKM PAMSIMAS pada tahun sebelumnya (Desa yang belum merealisasikan alokasi APBDes pada sharing pembiayaan kegiatan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) PAMSIMAS tidak akan diberikan kegiatan lanjutan PAMSIMAS)

3. Sasaran penerima manfaat PAMSIMAS

Penerima manfaat dari program PAMSIMAS adalah warga desa/kelurahan yang belum mempunyai akses terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak terutama kelompok miskin, dan masyarakat terpinggirkan (indigenous people) atau disebut juga masyarakat adat dan komunitas adat terpencil (MAKAT) yang diidentifikasi oleh masyarakat sendiri, disepakati dan ditetapkan bersama oleh masyarakat desa/kelurahan melalui proses musyawarah warga. (Pedoman Umum PAMSIMAS edisi 2022).

II.3.3. Strategi PAMSIMAS

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas maka diterapkan strategi sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat hidup bersih dan sehat melalui pembangunan sistem air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.
2. Mengarusutamakan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat dalam pembangunan sistem air minum dan sanitasi.
3. Melakukan sharing program APBN dan APBD, dimana untuk "Desa-APBN dan Desa APBD, dana APBN/APBD akan membiayai BPM (Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat) sebesar 90% dan kontribusi masyarakat sebesar 10%.
4. Penerapan tiga pilihan kegiatan pembangunan dan pengembangan SPAM pada desa sasaran PAMSIMAS, sebagai berikut.
 - Pembangunan Baru adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana yang sebelumnya tidak ada.
 - Peningkatan adalah upaya untuk penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM yang tersedia baik sebagian maupun keseluruhan.
 - Perluasan adalah upaya untuk penambahan cakupan pelayanan SPAM.
5. Penerapan Pendekatan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) - pendekatan STBM diterapkan pada skala kabupaten kota dengan

pelibatan aktif dan intensif para sanitarian, penanggungjawab promkes, kepala puskesmas, bidan desa, dan kader Kesehatan.

6. Penguatan Kelembagaan di tingkat kabupaten/kota dilakukan sebagai bagian dari fungsi Pokja AMPL/PPAS/PKP dan Asosiasi Pengelola SPAM perdesaan. Kedua lembaga ini akan terus berperan dalam membantu Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan program air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat, memastikan keberlanjutan program, dan memfasilitasi kemitraan pembangunan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.
7. Penguatan peran Pemerintah Desa untuk mampu mengelola pengembangan SPAM di wilayahnya baik melalui PAMSIMAS, APBDesa, program air minum dan sanitasi lainnya maupun swadaya, mengintegrasikan program AMPL dalam perencanaan pembangunan desa, serta meningkatkan pembiayaan bidang AMPL untuk mencapai target pelayanan air minum dan sanitasi 100% bagi warga masyarakat.
8. Penguatan peran Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (PPW) Provinsi dalam pelaksanaan dan pengendalian Program PAMSIMAS. (Pedoman Umum PAMSIMAS edisi 2022).

II.3.4. Pendekatan PAMSIMAS

Seluruh pelaksanaan dan pengelolaan PAMSIMAS ini menganut pendekatan sebagai berikut:

1. Kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga berbasis Tupoksi artinya Program PAMSIMAS merupakan program bersama antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berdasarkan tupoksi masing masing
2. Peran Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pemegang kebijakan dalam pengusulan desa/kelurahan serta kolaborasi berbagai program air minum dan sanitasi yang bekerja di wilayah kabupaten/kota untuk memastikan percepatan pencapaian akses universal air minum dan sanitasi.
3. Berbasis Masyarakat, artinya PAMSIMAS menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penanggung jawab kegiatan dan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi. (Pedoman Umum PAMSIMAS edisi 2022).

II.3.5. Prinsip PAMSIMAS

Prinsip yang diterapkan dalam Program PAMSIMAS adalah sebagai berikut:

1. Tanggap Kebutuhan - Program PAMSIMAS diberikan kepada lokasi yang membutuhkan dan bersedia memelihara serta mengelola sistem terbangun. Alokasi bantuan dana stimulan BPM disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kesiapan masyarakat.

2. Partisipatif - seluruh masyarakat (baik miskin, kaya, perempuan, laki-laki) menjadi pelaku utama dan terlibat secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan Program PAMSIMAS.
3. Kesetaraan Gender - Program PAMSIMAS memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan maupun laki-laki, untuk mengambil keputusan, berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan sarana air minum dan sanitasi.
4. Keberpihakan pada Masyarakat Miskin - Program PAMSIMAS memastikan masyarakat miskin mendapatkan akses air minum dan sanitasi yang aman.
5. Akses bagi Semua Masyarakat - Program PAMSIMAS memastikan semua masyarakat termasuk masyarakat berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas) dapat mengakses air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan.
6. Perlindungan pada Anak - Program PAMSIMAS memastikan bahwa pelayanan air minum dan sanitasi yang dibangun akan mudah untuk dimanfaatkan dan ramah pada anak.
7. Keberlanjutan - sarana terbangun dan perubahan perilaku memberikan manfaat secara menerus. Keberlanjutan harus diciptakan bersama oleh para pelaku Program PAMSIMAS sejak awal pelaksanaan.
8. Transparansi dan Akuntabilitas - pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan hasil Program PAMSIMAS harus dilakukan secara terbuka dan dapat

dipertanggungjawabkan Seluruh pelaku terkait dan masyarakat berhak mendapatkan informasi secara akurat dan terpercaya.

9. Berbasis Nilai - Program PAMSIMAS diselenggarakan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur terutama kejujuran, dapat dipercaya, tanpa pamrih, dan gotong royong. (Pedoman Umum PAMSIMAS edisi 2022).

II.3.6. Kondisi Yang Diharapkan

Strategi, pendekatan, dan prinsip dalam Program PAMSIMAS adalah untuk mewujudkan lingkungan strategis yang mendukung pencapaian tujuan program yaitu:

1. Masyarakat bersedia menerapkan perilaku dan praktik perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
2. Masyarakat memperoleh akses yang keberlanjutan terhadap pelayanan air minum yang aman dan sanitasi yang layak, serta mampu menggunakan, memelihara, dan mengelola pelayanan secara mandiri, efektif, dan berkelanjutan,
3. Pemerintah Desa memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung dan mengupayakan keberlanjutan serta pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi di desa dengan berpegang pada prinsip PAMSIMAS.
4. Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) memiliki komitmen yang kuat dalam perluasan pelaksanaan program dan pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan dengan menggunakan pendekatan PAMSIMAS.

5. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk meningkatkan kinerja kelembagaan, teknis dan keuangan dalam sistem pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan secara berkelanjutan. (Pedoman Umum PAMSIMAS edisi 2022).

II.3.7. Sumber Pendanaan

Program PAMSIMAS dibiayai melalui sumber dana pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) dari Bank Dunia, Pemerintah Indonesia melalui APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, APBDes, serta dana kontribusi masyarakat.

1. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)

Alokasi dana yang berasal dari PHLN pada dasarnya terbagi atas 2 bagian yaitu:

Alokasi Non-BLM, bantuan dana di luar BLM untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Dana ini meliputi pengadaan barang, pengadaan fasilitator dan bantuan teknis (jasa konsultan), sosialisasi, workshop dan pelatihan komponen 1, 2 dan 5, dan lain sebagainya.

1) Alokasi BLM Desa

Bantuan dana yang diberikan langsung kepada masyarakat untuk membiayai kegiatan komponen 3 untuk pembangunan baru sarana air minum dan sanitasi masyarakat yang dituangkan dalam RKM di desa.

2. Sumber Pendanaan Dari Pemerintah Indonesia

1) APBN negara

Dana yang berasal dari Pemerintah antara lain digunakan untuk sebagian kegiatan yang berkaitan dengan:

- a. BPM APBN untuk Desa Baru (Komponen 3) sebesar minimal 90% dari total pagu RKM Desa APBN dengan kontribusi masyarakat sebesar 10%.
- b. BPM APBN untuk Desa PAMSIMAS dengan opsi perbaikan kinerja dan pengembangan (Komponen 4) sebesar minimal 90% dari total pagu RKM Desa APBN dengan kontribusi masyarakat sebesar 10%.
- c. Alokasi Dana Hibah Air Minum Perdesaan (Komponen 4) untuk percepatan pencapaian target 100% akses layanan air minum di kabupaten sasaran sejumlah nilai Dana APBD yang digunakan untuk BPM yang outputnya sudah terverifikasi.
- d. Manajemen termasuk biaya perjalanan dan monitoring.
- e. Pelatihan/Workshop/Rapat Koordinasi
- f. Honorarium pengelola kegiatan di tingkat pusat.
- f. Operasional kantor CPMU dan Satker baik di pusat dan provinsi.
- g. Pengadaan barang/jasa dan jasa konsultan

2) APBD Provinsi

Dana yang berasal dari pemerintah provinsi yang dianggarkan tiap tahunnya adalah kegiatan program untuk pos-pos yang telah ditetapkan oleh Biro Keuangan dan Bappeda dari Pemerintah Provinsi Peserta PAMSIMAS, antara lain:

- a. Honorarium pengelola kegiatan di tingkat provinsi.
- b. Rapat koordinasi berkala di tingkat provinsi.
- c. Pemantauan dan evaluasi kegiatan di tingkat provinsi, kabupaten dan pusat.
- d. Manajemen dan operasional kantor PPMU.
- e. Kegiatan pengembangan kapasitas pemerintah daerah • Kegiatan pengembangan sarana air minum dan sanitasi

3) APBD Kabupaten

Dana yang berasal dari Pemerintah antara lain digunakan untuk sebagian kegiatan yang berkaitan dengan:

- a. BPM APBD untuk Desa Baru (Komponen 3) sebesar minimal 90% dari total pagu RKM Desa APBD dengan kontribusi masyarakat sebesar 10%.
- b. BPM APBD untuk Desa PAMSIMAS dengan opsi perbaikan kinerja dan pengembangan (komponen 4) sebesar minimal 90% dari total pagu RKM Desa APBD dan masyarakat sebesar 10%.
- c. Alokasi Dana Hibah Air Minum Perdesaan/HAMP (Komponen 4) untuk percepatan pencapaian target 100% akses layanan air minum.
- d. Dana operasional Pokja AMPL/PPAS/PKP dan DPMU
- e. e. Dana Monitoring dan Evaluasi Kegiatan.

4) APBDes

Dana Pemerintah Desa bersumber dari APBDesa dianggarkan setiap tahunnya adalah untuk kegiatan fisik dan/atau non-fisik. Penggunaan dana APBDesa adalah sebagai berikut:

- a. Kontribusi (minimal sebesar 10% dari nilai RKM) untuk pembangunan penyediaan air minum di desa baru yang menerima BLM APBN.
- b. Kegiatan fisik yang sifatnya pengembangan dan peningkatan.
- c. Pembiayaan tenaga fasilitator pendamping kader desa (pendampingan penyusunan dan pelaksanaan RKM).

Alokasi APBDesa untuk PAMSIMAS merupakan bentuk komitmen dari pemerintah desa dalam melayani warganya di bidang air minum dan sanitasi.

5) Kontribusi Masyarakat

Kontribusi masyarakat untuk pengembangan desa regular, minimal sebesar 10% dari total RKM. Kontribusi masyarakat ini dapat terdiri dari: uang tunai (in-cash) dan atau tenaga kerja/material (in-kind), yang merupakan dana pendukung bagi pembiayaan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, direncanakan oleh masyarakat dan dituangkan di dalam RKM.

Kontribusi masyarakat sedapat mungkin menjangkau seluruh warga desa/kelurahan dengan tujuan pelayanan air minum dan sanitasi menjadi bagian dari tanggung jawab bersama dan membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat desa serta bukan hanya tanggung jawab warga di wilayah yang terlayani saja (dusun).

Kontribusi masyarakat dimaksudkan sebagai wujud dari komitmen membangun rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap kegiatan maupun hasil kegiatan yang dilakukan masyarakat sendiri. Semakin besar kontribusi masyarakat semakin tinggi komitmennya untuk memiliki dan bertanggungjawab pada pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS. Dengan demikian dana bantuan PAMSIMAS pada hakekatnya merupakan stimulan dan penghargaan atas tumbuhnya kepedulian, prakarsa, inisiatif dan rasa memiliki dan bertanggungjawab masyarakat. (Pedoman Umum PAMSIMAS edisi 2022).

II.4. Kerangka berpikir

